

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Parlindungan 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju

Adrian Sutedi, 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan 3, Jakarta:Sinar Grafika

Adrian Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*,(Jakarta: Cipta Jaya, 2005), hal. 71.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya, Jilid 1 – Hukum Tanah Nasional*, Jakarta-Djambatan 2003.

Daliyo dan kawan-kawan, *Hukum Agraria I*, Cetakan 5, Jakarta: Prehallindo:2001

Wantjik Saleh, 1984, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Prakoso Djoko, 1985, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Samun Ismaya, *Hukum Administrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 22-24

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas tanah*, Jakarta, Kencana

Yamin Lubis dan Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Medan: Mandar Maju

Jurnal Hukum

- Bayu Sugara, 2011, *Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Penguatan Hak Atas Tanah di Kecamatan Plaju Kota Palembang*, Universitas Diponegoro, Vol. 1(1): 45-75.
- Chulliyatul Murodah, 2018, *Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) Di Kabupaten Sidoarjo*, Thesis, Universitas Airlangga, Vol. 4(1): 55-100.
- Dian Retno Wulan, 2005, *Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Di Kabupaten Karanganyar*, Universitas Diponegoro, Vol. 2(1): 31-110.
- Eko Purwanto, 2014, *Pelaksanaan Prona (Tanah Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Gunungkidul*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol. 20(1): 20-42.
- Fairuz Syifa Arifin, 2008, *Pembaruan Agraria Nasional (Pan) Dengan Program Sertifikasi Tanah Melalui Prona Guna Menyukkseskan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Pemalang*, Universitas Diponegoro, Vol. 5(1): 30-56.
- Fatimah Nurul, 2018, *Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Terkait Ketidaklengkapan Berkas*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Vol. 3(2): 15-32.
- Fitri Nur Khasanah, *Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Sebagai Upaya Tertib Hukum Pertanahan Di Kabupaten Gunung Kidul*, Jurnal Hukum UMY, Vol. 4(3): 10-85.
- Indriani Weni, 2008, *Pensertifikatan Tanah Massal Melalui Prona Untuk Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan (Studi Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali)*. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 1(6): 12-34.
- Mandala, Marthinus Mesak, 2016, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Barito Timur*. Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol. 4(12): 35-88
- Pratiwi, Dwi Endang, 2013, *Suatu Tinjauan Mengenai Proyek Operasi Nasional Agraria Sebagai Salah Satu Pelaksana Fungsi Agraria Di Kabupaten Lamongan*. Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, Vol. 3(7): 15-41.
- Ramadhana Muhammad, 2015, *Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Secara Gratis Di Kota Malang (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Malang)*, Universitas Brawijaya, Vol. 5(3): 78-110

Sunarno, 2015, *Good Land Principle In Disaster Region Areas*, Yogyakarta:Jurnal Media Hukum UMY, Vol. 22(1):16

Internet

http://eprints.undip.ac.id/17306/1/FAIRUZ_SYIFA_ARIFIN.pdf diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 15.24 wib

<http://repository.umy.ac.id/discover> diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 23.30 WIB

<http://www.bpn.go.id/TENTANG-KAMI/Sekilas-ATR-BPN> diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 13.57 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 15.00 WIB

http://eprints.undip.ac.id/16720/1/Bayu_Sugara.pdf , diakses pada tanggal 8 Maret 2018, pukul 13.00 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap
Nomor : 01/JUKNIS-300/2016.